

Judul : Menkeu Potong 10% Dana Perjalanan Dinas
Tanggal : Selasa, 18 September 2012
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Menkeu Potong 10% Dana Perjalanan Dinas

PEMERINTAH terus mendorong pemangkasannya penggunaan anggaran perjalanan dinas sebagai bagian dari kebijakan penghematan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pihaknya telah mewajibkan semua kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah memotong 10% dari anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan.

Menurut Agus, anggaran perjalanan dinas juga harus digunakan secara efektif untuk penghematan. "Kita yakin masih ada ruang lagi untuk mengurangi biaya perjalanan dinas," kata Agus di Jakarta, kemarin.

Secara terpisah, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menyampaikan bahwa setiap K/L memang seharusnya memiliki perencanaan dan pelaksanaan yang baik terkait dengan perjalanan dinas agar tidak terjadi pemborosan dan kebocoran anggaran.

"Mestinya tiap-tiap K/L merencanakan dan melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan," kata Herry, kemarin.

Di sisi lain, ke depan pemerintah dikatakan akan menerapkan program pertumbuhan *flat* untuk anggaran perjalanan dinas. Dengan demikian, anggaran perjalanan dinas yang tidak perlu bisa dipangkas.

Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait menegaskan, baik



MIZM IREAN

Agus Martowardojo
Menteri Keuangan

pemerintah, DPR, maupun lembaga yudikatif sebaiknya melakukan moratorium perjalanan dinas. "Kita (DPR), pemerintah harus memberikan contoh di tengah krisis global. Salah satu cara berhemat harus dimulai dengan moratorium perjalanan dinas dari kita yang membuat aturan, DPR," tegasnya.

Selain itu, kata Maruarar, penggunaan anggaran perjalanan dinas juga harus diaudit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena sering kali bocor. DPR pun akan meminta BPK melakukan itu.

Dalam empat tahun terakhir, anggaran perjalanan dinas berturut-turut mencapai Rp15,2 triliun pada 2009, meningkat jadi Rp18,3 triliun pada 2010, kemudian Rp19,6 triliun pada 2011, dan turun menjadi Rp18 triliun pada 2012. Namun, Menkeu menyebutkan pada 2013 angka itu bisa meningkat hingga Rp23 triliun. (Mrc/X-9)